

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN,  
DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP  
TAX AVOIDANCE**

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode  
2014-2016)

**Oleh :**

**Riska Fadhillia**

**Pembimbing : M. Rasuli dan Rofika**

*Faculty of Economic sand Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*Email : [r.fadhillia@yahoo.co.id](mailto:r.fadhillia@yahoo.co.id)*

*The Effects of Corporate Governance, Firm Size, and Corporate Social  
Responsibility on Tax Avoidance (Empirical Study On Manufacturing Companies  
Listed on IDX Periods of 2014-2016)*

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the effect of corporate governance, firm size, and tax avoidance to the acceptance of tax avoidance. The samples of this research are manufacturing companies which listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2014 to 2016. The population of this research are 27 companies. Based on purposive sampling method, the total of final samples are 81 samples. Analysis of data is carried out using multiple regression method with the aid of SPSS version 23 computer program. The result of this research show that managerial ownership, independent board of commissioners, audit committee, and corporate social responsibility are influence on tax avoidance. While institusional ownership and firm size has no effect on tax avoidance.*

*Keywords : managerial ownership, institusional ownership, independent board of  
commisioners, audit committee, firm size, corporate social  
responsibility, and tax avoidance.*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar dan digunakan untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi kesejahteraan negara. Pajak pada perusahaan dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan tersebut. Secara umum, suatu perusahaan meminimalkan

beban tersebut untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Hal ini memaksa perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak melalui tindakan penghindaran pajak atau biasa disebut dengan *tax avoidance*.

Menurut Pohan (2013:11), *tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Tujuan *tax avoidance* adalah untuk merekayasa usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak karena dalam hal ini merupakan unsur dalam pengurangan pajak. Oleh karena itu, *tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran dalam peraturan perpajakan atau secara tidak etis dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk menghindari, meminimalkan, atau meringankan beban pajaknya.

Menurut Yenny Sucipto Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pengelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Kebanyakan badan usaha yang bergerak di sektor mineral dan batu bara dan juga perusahaan asing. Ada juga perusahaan berbadan hukum Indonesia, tetapi kepemilikannya sebetulnya oleh asing. Menurut laporan Global Financial Integrity menyebutkan, dalam kurun waktu 2004-2013 dana ilegal yang keluar dari Indonesia mencapai 180,71 miliar dollar AS atau setara Rp 2.100 triliun. (suara.com, 30 November 2017).

*Corporate governance* merupakan suatu sistem yang menjamin terpenuhinya kewajiban perusahaan kepada *stakeholder* dan *shareholdernya*, dan harus mampu bekerja sama dengan *stakeholders* dalam mencapai tujuan perusahaan. . independen, dan komite audit.

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar yang memperoleh laba besar juga akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai.

Tanggung jawab sosial atau *Corporate social responsibility* (CSR), merupakan tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan (Sudana, 2011: 10). Tanggung jawab ini didasari pada perhatian perusahaan bagi kesejahteraan semua pemangku kepentingannya, tidak hanya pemiliknya. Perusahaan memberi informasi telah melakukan CSR dengan cara mengungkapkan CSR.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Diantri dan Ulupui (2016) dan Rahmawati, *et, al* (2016) dengan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manjerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan CSR.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian iniantara lain: 1) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 3) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 4) Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 5) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 6) Apakah *corporate*

*social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. 2) Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. 3) Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. 4) Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. 5) Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. 6) Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS Pajak**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2011:1).

### **Teori Keagenan**

Dalam kondisi yang demikian pemilik perlu menunjuk pihak lain (agen) yang profesional, untuk melaksanakan tugas mengelola kegiatan perusahaan dengan lebih baik. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik, karena adanya pemisahan antara pihak

pemilik dan pihak pengelola (manajemen), kemungkinan adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak tidak bisa dihindari. Pihak manajemen bisa bertindak untuk kepentingannya sendiri dalam mengelola perusahaan dan mengabaikan kepentingan pemilik perusahaan (Sudana, 2011:11)

### **Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Menurut Pohan (2013:13) *tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

### ***Corporate Governance***

*Cadbury Committee*, seperti dikutip oleh Forum *for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), mengartikan *Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

### **Kepemilikan Manajerial**

Menurut Bodie, *et all* (2006) kepemilikan manajerial merupakan pemisahan kepemilikan antara pihak outsider dengan pihak insider.

Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari.

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusi seperti kepemilikan saham oleh bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas, dan lembaga keuangan lainnya (Aini dan Cahyonowati, 2011)

### **Dewan Komisaris Independen**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik:

“Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas jasa Keuangan ini”.

### **Komite Audit**

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

### **Ukuran Perusahaan**

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. (Dharma dan Ardiana 2015). Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil.

### ***Corporate Social Responsibility***

Menurut Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2011:5) *corporate social responsibility* merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Perusahaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah menaati hukum dalam pelaksanaan bisnisnya.

### ***Tax Avoidance***

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang

menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2007:49)

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance***

Pramudito dan Sari (2015), menyimpulkan bahwa adanya kepemilikan manajerial dapat memberikan pengawasan terhadap perusahaan. Peningkatan kepemilikan manajerial akan membuat semakin rendahnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, sebaliknya semakin rendah kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Kepemilikan manajerial diduga dapat menyamakan antara kepentingan pemegang saham oleh manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer juga akan menanggung risiko apabila mengalami kerugian yang ada sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Pujiati dalam Bachtiar, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Diantri dan Ulupui (2016) kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam

suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial.

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI Nomor Kep-305/BEJ/07-2004, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pohan (2008). Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan,

khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance**

Menurut Diantri dan Ulupui (2016) komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi. Tanggung jawab komite audit dalam *corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H<sub>4</sub>: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance**

Menurut Kurniasih dan Sari (2013), semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan

metode akuntansi yang menanggihkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan. Perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H<sub>5</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

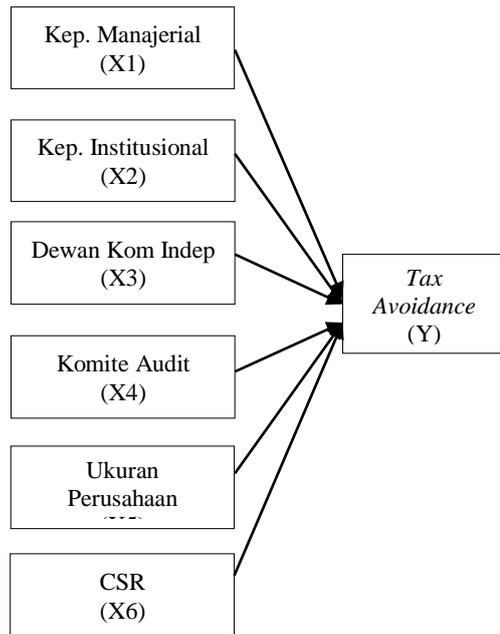
#### **Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melibatkan semua hubungan yang terjadi pada perusahaan dengan semua stakeholder termasuk di dalamnya terdapat pelanggan, atau customers, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, bahkan lapisan masyarakat. Jika sebuah perusahaan mengelola CSR perusahaannya dengan baik, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan maupun manfaat yang signifikan dalam bentuk reputasi perusahaan yaitu, dalam hal rekrutmen, motivasi dan refrensi karyawan serta sebagai saran untuk membangun dan mempertahankan kerja sama (Rahmawati *et.al*, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah:

H<sub>6</sub>: *Corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **Gambar 1 Model Penelitian**



## METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2016 adalah 27 perusahaan. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

Adapun kriteria pengambilan sampel penelitian yaitu:

- 1) Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016.
- 2) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selama tahun pengamatan untuk periode 31 Desember.
- 3) Laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang rupiah.

- 4) Perusahaan yang memenuhi kriteria pengukuran variabel penelitian.
- 5) Perusahaan yang memiliki keuntungan secara berturut-turut selama periode penelitian.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa laporan keuangan yang telah dipublikasikan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Variabel yang diteliti tersedia dengan lengkap dalam pelaporan keuangan tahun 2014 sampai dengan 2016. Sumber data diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory*, *IDX Statistics*, dan website IDX: <http://www.idx.co.id>

## Metode Analisis

Pengukuran dan analisis terhadap pengembangan hipotesis terhadap hubungan variabel independen dan variabel dependen mendasarkan pada model regresi. Hipotesis tersebut menyatakan bahwa *tax avoidance* sebagai variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam model 1 dinyatakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap hubungan *tax avoidance*. Pengujian terhadap model 1:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

dimana:

Y = *tax avoidance*

$\alpha$  = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$  = koefisien regresi

X<sub>1</sub> = Kep. manajerial

X<sub>2</sub> = Kep. institusional

- X<sub>3</sub> = Dewan Kom  
Independen  
X<sub>4</sub> = Komite audit  
X<sub>5</sub> = Ukuran  
perusahaan  
X<sub>6</sub> = CSR  
e = error  
(pengganggu)

### Definisi Operasionalisasi Variabel Dan Pengukurannya

#### Tax Avoidance (Y)

*Effective Tax Rate* (ETR)

yang merupakan ukuran hasil berbasis laporan laba rugi yang umumnya dapat mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak yang dilakukan perusahaan dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Pengukuran ini banyak terdapat dalam literatur untuk mengukur *tax avoidance*. Menurut White *et.al* dalam Brigham dan Houtson (2009:68), rumus untuk menghitung ETR adalah:

$$ETR = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

#### Kepemilikan Manajerial (X1)

Menurut Bodie, *et all* (2006) Kepemilikan manajerial merupakan pemisahan kepemilikan antara pihak outsider dengan pihak insider. Menurut Melinda (2008) mendefinisikan kepemilikan manajerial adalah persentase suara yang berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan komisaris suatu perusahaan.

$$\text{Manjerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajerial}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

#### Kepemilikan Institusional (X2)

Besar kecilnya pengaruh variabel kepemilikan institusional sebagai proksi *good corporate*

*governance* dalam penelitian ini akan diukur menggunakan persentase kepemilikan institusional terhadap perusahaan secara keseluruhan. Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan presentase (Khurana: 2009).

$$\text{Institusional} = \frac{\text{proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

#### Dewan Komisaris Independen (X3)

Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan.

Independensi dewan komisaris dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut Daniri (2006:30):

$$\text{Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$$

#### Komite Audit (X4)

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit diukur dengan menggunakan indikator banyaknya jumlah komite audit diluar komisaris independen dibagi dengan jumlah komite audit dalam perusahaan. Rumus komite audit Daniri (2006:45):

$$\text{Komite audit} = \sum \text{Jumlah Komite}$$

## Ukuran Perusahaan (X5)

Ukuran perusahaan diproksi dengan total *asset* karena nilai total *asset* biasanya sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya, maka dengan maksud untuk mengurangi peluang heteroskedastis, variabel *asset* ‘diperhalus’ menjadi Log (*asset*) atau Ln (*asset*) (Asnawi dan Wijaya, 2005:274).

$$Size = \ln (total\ asset)$$

## Corporate Social Responsibility

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), merupakan tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan (Sudana, 2011: 10).

Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada *check list* dengan item yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila item *i* diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item *i* tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada

$$CSR_i = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang telah terkumpul yang mencakup dari nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviation (Sugiyono, 2012:206). Statistik penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1**

**Descriptive Statistics**

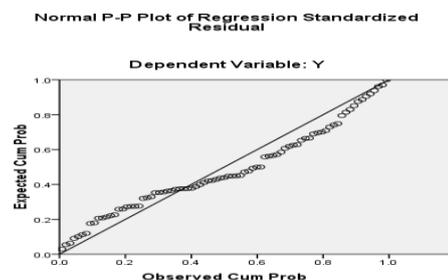
	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Devi ation
MINJ	81	.0000 5	.3392 0	.08033 02	.1059 3982
INST	81	.0211 0	.9773 0	.52027 16	.2439 7352
INDEP	81	.3333 3	.6666 7	.37745 78	.0744 3519
AUDIT SIZE	81	3	5	3.06	.561 189.6
CSR	81	1.180 .397	1.938 .330	145.56 8.888	90.31 3 626.7
TA	81	4.230 .800	6.923 .100	559.98 6.914	10.36 3 1213
Valid N (listwise)	81	.0662 8	.8350 5	.27811 20	.1213 9627

Sumber : Data Olahan (2018)

## Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil Ghozali (2016:154). Salah satu cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat dengan menggunakan analisis grafik *Normal P-P Plot of Regression Standarized Residual*.

**Gambar 2**



Sumber : Data Olahan (2018)

Hasil pengujian menggunakan grafik normal Normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual* dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar didekat garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini (Ghozali, 2013:160).

### Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Penelitian ini menggunakan nilai dari *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance*. Jika nilai *tolerance* lebih dari atau sama dengan 10% ( $\geq 0,10$ ) dan nilai *Variance Inflation Factor* kurang dari atau sama dengan 10 ( $\leq 10$ ), maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2013).

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Manajerial	.583	1.715
Institusi	.683	1.465
Independen	.831	1.203
Audit	.745	1.342
Size	.523	1.913
CSR	.843	1.187

Sumber : Data Olahan (2018)

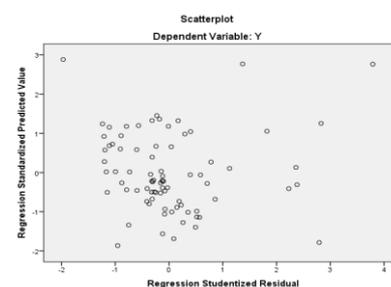
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai  $VIF < 10$  untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance*  $> 0,10$ .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinieritas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

### Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas, dimana titik-titik dalam gambar *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. tetapi, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139).

**Gambar 3**



Sumber : Data Olahan (2018)

Dari gambar Scatterplot di atas terlihat data menyebar secara acak diatas dan dibawah titik 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Gejala autokorelasi sering ditemukan pada data *time series*. Autokorelasi merupakan gejala yang terjadi karena antar observasi dari satu variabel atau objek yang sama, dengan rentang waktu yang sama sehingga terjadi hubungan dari

waktu kewaktu lain. Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi adalah dengan melakukan uji Durbin-Watson. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Durbin-Watson	N	Keterangan
1.734	27	Tidak terdapat Autokorelasi

**Sumber :** *Data Olahan (2018)*

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai  $d_{hitung}$  (Durbin Watson) terletak antara  $-2$  dan  $+2 = -2 < 1,734 < +2$ . Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

**Analisis Regresi Berganda**

Setelah dilakukan tabulasi terhadap hasil penghitungan masing-masing variabel maka data-data tersebut dimasukkan/diproses ke dalam Program SPSS For Windows versi 23.00 untuk melihat pengaruh masing-masing variabel.

**Persamaan Garis Regresi**

Berdasarkan hasil perhitungan dengan Program SPSS for Windows versi 23.0 diperoleh koefisien-koefisien pada persamaan Regresi Linear Berganda sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.448	.155		2.890	.005

Manajerial	.365	.151	.319	2.419	.018
Institusi	-.031	.061	-.063	-.514	.609
Independen	.362	.180	-.222	2.013	.048
Audit	.068	.025	-.316	2.713	.008
Size	.009	.009	-.134	-.963	.338
CSR	.006	.002	-.322	2.940	.004

a. Dependent Variable: tax avoidance (Y)

**Sumber :** *Data Olahan (2018)*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda dalam analisis ini adalah:

$$Y = 0,448 + 0,365 X_1 - 0,031 X_2 - 0,362 X_3 - 0,068 X_4 - 0,009 X_5 - 0,006 X_6$$

Arti persamaan regresi linear tersebut adalah :

- Nilai konstanta (a) sebesar 0,488. Artinya adalah apabila Manajerial, Institusional, INDEF, Audit, Size, CSR tetap maka agresivitas perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,488 dimana *tax avoidance* dianggap konstan.
- Nilai koefisien regresi kepemilikan manajerial sebesar 0,365, artinya adalah setiap penambahan kepemilikan manajerial sebesar 1% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka akan menyebabkan *tax avoidance* akan naik sebesar 0,365.
- Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar -0,031, artinya adalah setiap penambahan kepemilikan institusional sebesar 1% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka akan menurunkan tingkat tarif pajak efektif sebesar 0,031.
- Nilai koefisien regresi komisaris independen sebesar -0,362, artinya adalah setiap

penambahan komisaris independen sebesar 1% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka akan menurunkan tingkat *tax avoidance* sebesar 0,362.

- e. Nilai koefisien regresi komite audit sebesar -0,068, artinya adalah setiap penambahan komite audit sebesar 1% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka akan menurunkan tingkat *tax avoidance* sebesar 0,068.
- f. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar -0,009, artinya adalah setiap penambahan ukuran perusahaan sebesar 1% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka akan menurunkan tingkat *tax avoidance* sebesar 0,009.
- g. Nilai koefisien regresi *CSR* sebesar -0,006, artinya adalah setiap penambahan *CSR* sebesar 1% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, maka akan menurunkan tingkat tarif pajak efektif sebesar 0,006.

### **Pembahasan Hasil Uji Hipotesis**

Pembahasan dalam penelitian ini adalah menguraikan temuan secara keseluruhan yang diperoleh dari analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Sedangkan hasil pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan manajerial yang menunjukkan nilai signifikansi 0,018 yang lebih kecil dari nilai kepemilikan manajerial 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung} 2,419 > t_{tabel} 1,993$  yang

menunjukkan arah positif. Dengan demikian Hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan “Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*” **Diterima**.

#### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan institusional yang menunjukkan nilai signifikansi 0,609 yang lebih besar dari nilai kepemilikan institusional 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung} -0,514 < t_{tabel} 1,993$  yang menunjukkan arah negatif. Dengan demikian Hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan “Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*” **Ditolak**.

#### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Dewan komisaris independen yang menunjukkan nilai signifikansi 0,048 yang lebih kecil dari nilai komisaris independen 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung} -2,013 < t_{tabel} 1,993$  yang menunjukkan arah negatif. Dengan demikian Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan “Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*” **Diterima**.

#### **Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Komite audit yang menunjukkan nilai signifikansi 0,008 yang lebih kecil dari nilai komite audit 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit

berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung} 2,713 > t_{tabel} 1,993$  yang menunjukkan arah negatif. Dengan demikian Hipotesis ketiga ( $H_4$ ) yang menyatakan “komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*” **Diterima**.

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance**

Ukuran perusahaan yang menunjukkan nilai signifikan 0,338 yang lebih besar dari nilai ukuran perusahaan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung} 0,963 > t_{tabel} 1,993$  yang menunjukkan arah negatif. Dengan demikian Hipotesis kelima ( $H_5$ ) yang menyatakan “ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak” **Ditolak**.

#### **Pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance**

CSR yang menunjukkan nilai signifikansi 0,004 yang lebih kecil dari nilai CSR 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung} -2,940 > t_{tabel} 1,993$  yang menunjukkan arah negatif. Dengan demikian Hipotesis keenam ( $H_6$ ) yang menyatakan “CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*” **Diterima**.

#### **Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )**

**Tabel 5**

Model Summary<sup>a</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.501 <sup>b</sup>	.251	.190	.10923857

a. Predictors: (Constant), CSR,Manajerial,Independen,Komite Audit, Institusi,Ukuran

b. Dependent Variable: tax avoidance (Y)

**Sumber :** Data olahan (2018)

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan jangka waktu pengamatan agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan efisien.
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan sektor industri selain manufaktur seperti pertanian dan pertambangan, keuangan, jasa atau perbankan.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance* diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aini, Nur Nike dan Cahyonowati, Nur. 2011. Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang*.

Ardyansyah, Danis. 2014. Pengaruh *Size, Leverage, Profitability,*

- Capital Intensity Ratio*, dan Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Asnawi, Said Kelana dan Wijaya Chandra. 2005. Riset Keuangan: Pengujian-Pengujian Empiris. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bachtiar, Mochamad Danu. 2015. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan *Capital Intensity* Terhadap *Effective Tax Rate* (Etr). *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Bodie, Kane Alex, Marcus Alan. (2006). Investasi, Alih Bahasa oleh Zuliani Dalimunthe dan Budi Wibowo. Jakarta : Salemba Empat.
- Diantri, Putu Rista dan IGK Agung Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 16.1.Juli 2016*.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Fadila, Melisa. 2017. Pengaruh *Return On Asset, Lverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon Universitas Riau, Vol 4 No.1. (Februari) 2017*.
- Khurana dan Moser. 2009. *Shareholder Investment Horizons and Tax Aggressiveness*. University of Missouri Columbia, MO 65211.
- KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). 2006.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Melinda, F.I, dan Bertha S. Sutejo. (2008). Interdependensi Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol 7 No.2*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Pohan, H. T. 2008. Pengaruh *Good Corporate Governance*, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. <http://hotmanpohan.blogspot.com> diakses pada tanggal 10 November 2017

- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pramudito, Batara Wiryo dan Maria M. Ratna Sari. 2015. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manjerial, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*. *Ejurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 13.3 Desember 2015*: 705-722.
- Putri, Shintya Dewi Adi. 2015. Analisis Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak). *Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol.4 No.2 Juli 2015*: 123-142.
- Rahmawati, Ayu, MG Wi Endang, dan Rosalita Rachma Agusti. 2016. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol 1 No. 1*.
- Sara, Dian Mustika. 2016. Pengaruh *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *JOM Fekon Universitas Riau, Vol 3 No. 1*.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business*. Jakarta : Salemba empat
- Soemarso, 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat
- Sudana, I Made. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Yogyakarta: Alfabeta
- Solihin, Ismail. 2011. *Corporate Social Responsibility From Charity To Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 74
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.katadata.co.id> (diakses pada tanggal 25 April 2018)
- <http://www.metrotvnews.com> (diakses pada tanggal 25 April 2018)
- <http://www.suara.com> (diakses pada tanggal 25 April 2018)